


NUGROHO NOTOSUSANTO

MASALAH PENELITIAN
SEJARAH KONTEMPORER
(suatu pengalaman)



INTI IDAYU PRESS

NUGROHO NOTOSUSANTO

**MASALAH PENELITIAN
SEJARAH KONTEMPORER
(suatu pengalaman)**

*Ceramah tanggal 3 Desember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional
Jakarta*

INTI IDAYU PRESS – JAKARTA 1984

KATALOGUS DALAM TERBITAN

Notosusanto, Nugroho

Masalah penelitian sejarah kontemporer: (suatu pengalaman): ceramah tanggal 3 Desember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta/Nugroho Notosusanto.
— Cet. 2. — Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.

48 hal. ; 21 x 14,5 cm.

1. *Historiografi.* 1. *Judul.*

907.2

Cetakan ke-1 : 1978

Cetakan ke-2 : 1984

No. : IIP.056.II.1984

Hak pengarang dilindungi undang-undang.

Hak penerbitannya ada pada: Penerbit PT Inti Idayu Idayu Press,
Jalan Kwitang no. 13, Jakarta Pusat.

Dicetak oleh PT Inti Idayu Press, Jakarta.

KATA PENGANTAR

Menelaah suatu pengalaman, khususnya pengalaman seseorang yang mempunyai karir tertentu, berarti kita melihat masalah yang dihadapi seseorang dalam perjalanan karirnya. Kenyataan yang ditemui tidak selalu menyenangkan, kadang-kadang tidak lepas dari hal-hal yang melukai hati.

Begitupun dengan pengalaman Nugroho Notosusanto yang mengkhususkan penyelidikannya pada sejarah kontemporer, sangat menarik tetapi tidak terlepas dari hal-hal di atas. Pengalaman itu disampaikannya dalam ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional pada tanggal 3 Desember 1977.

Bidang penelitian sejarah kontemporer yang sekarang ini ditekuni Nugroho, sepiantas tampaknya merupakan suatu hal yang kontroversial, sebab sejarah kontemporer langsung menyangkut pelaku-pelakunya yang masih hidup. Hidup penggarapnya bersamaan dengan pelaku-pelakunya, hingga tampaknya sejarah kontemporer masih "belum" sejarah. Dalam penggarapan itu Nugroho pernah dituduh seolah-olah memalsu sejarah, bahkan dimaki-maki dengan kata-kata yang kotor.

Pengalaman yang diuraikan Nugroho bukanlah untuk memperkecil semangat mereka yang sudah ataupun akan terjun dalam penelitian sejarah kontemporer, tapi justru sebaliknya. Bagi yang tidak ada hubungannya dengan penelitian sejarah kontemporer, hal-hal yang menarik dapat dianggap sebagai tambahan pengetahuan.

Dari kenyataan itulah ceramah Nugroho Notosusanto tersebut di atas, ditambah dengan *Asas-asas Metode Sejarah*, kami terbitkan menjadi sebuah buku dengan judul: "Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (suatu pengalaman)".

Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi pembaca.

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Pendahuluan	5
Sejarah Kontemporer	6
Metode Sejarah	10
Masalah Subyektivitas Sejarah	13
Masalah yang dihadapi	17
Dua komponen sejarah : fakta dan interpretasi	22
Sama-sama pelaku atau saksi belum tentu mengakui faham yang sama	27
Post scriptum	31
<i>Lampiran</i>	
Asas-asas Metode Sejarah	35

PENDAHULUAN

Saya ingin pada kesempatan ini mengambil sebagai judul suatu pokok, suatu subyek, yang bersifat laporan kepada masyarakat mengenai kegiatan penelitian dan penulisan sejarah yang telah saya lakukan. Mengapa? Karena bidang spesialisasi saya ini kadang-kadang masih dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial. Artinya, masih ada yang menganggap bahwa sejarah yang kita sebut *sejarah kontemporer* itu masih "belum" sejarah, karena dialami oleh yang masih hidup, termasuk sejarawannya sendiri. Namun, nanti akan saya terangkan mengapa saya bersama rekan-rekan merasa perlu untuk juga menggarap sejarah kontemporer itu, sejarah yang menyangkut mereka yang sampai sekarang masih hidup, yakni karena sesuatu kebutuhan yang mendesak.

SEJARAH KONTEMPORER

Istilah "sejarah kontemporer" itu dalam beberapa bahasa Barat yang sudah menggarap bidang ini disebut *contemporary history* dalam bahasa Inggris, *histoire contemporaine* dalam bahasa Prancis dan *Zeitgeschichte* dalam bahasa Jerman. Sebagai definisi saya pilihkan salah satu saja yang saya anggap praktis, yaitu dari Hans Rothfels*) yang berbunyi bahwa *Zeitgeschichte* ialah:

"die Epoche der Mitlebenden und wissenschaftliche Behandlung."

Artinya: sejarah kontemporer ialah zaman dari mereka yang hidupnya bersamaan, yakni bersamaan dengan kita baik pembaca maupun sejarawannya, serta penggarapannya secara ilmiah.

Jadi inilah definisi yang saya pergunakan. Dari definisi ini jelas bahwa pengertian sejarah kontemporer itu batasannya akan ikut sejalan

dengan manusia yang menggarap dan membacanya. Karena, apa yang untuk bapak-bapak kita barangkali masih sejarah kontemporer, mungkin untuk putra-putranya sudah merupakan sejarah yang "benar-benar". Jadi perspektifnya akan berubah.

Mengenai lingkup atau *scope* sejarah kontemporer Indonesia, David Thomson*) mengatakan bahwa ukurannya ialah abad kedua puluh. Sejarah yang menyangkut abad kedua puluh itu sudah *contemporary history*. Kalau diterapkan pada Indonesia, maka kiranya sejarah sejak Kebangkitan Nasional itulah yang disebut sejarah kontemporer. Tetapi buat banyak di antara rekan-rekan saya yang lebih muda di Universitas Indonesia, yang sudah tidak mengalami lagi zaman Pergerakan Nasional, episode itu sudah termasuk sejarah yang "benar-benar". Untuk mereka, mungkin perspektifnya agak bergeser, sehingga sejarah kontemporer Indonesia itu baru dimulai pada zaman Jepang. Jadi batas-batas antara yang kontemporer dan yang tidak, dari generasi ke generasi akan bergeser.

Saya sendiri termasuk generasi yang "tanggung". Terlalu tua belum (jadi belum cukup *wijs* atau arif-bijaksana untuk disebut tua) tetapi rasanya ya tidak muda lagi (artinya jika mengaku muda akan ditertawakan oleh anak-anak saya nanti). Sehingga buat saya sejarah kontemporer Indonesia itu dapat dimulai dari Kebangkitan Nasional, bisa juga mulai dari zaman Jepang. Spesialisasi saya sendiri ialah Sejarah Indonesia Sejak Zaman Jepang. Jika dalam ceramah ini saya menafsirkan sejarah kontemporer Indonesia ialah yang dimulai pada zaman Jepang, bukanlah karena saya mutlak menganggap itulah mulainya sejarah kontemporer, tetapi semata-mata karena kebetulan spesialisasi saya mulai zaman Jepang, sehingga yang saya ketahui agak lebih dari yang lain ialah sejarah Indonesia sejak zaman Jepang.

Kesulitan-kesulitan dalam penyusunan sejarah kontemporer ialah karena kadar subyektivitas dalam sejarah kontemporer itu lebih besar daripada mengenai, misalnya saja, sejarah abad kedelapan belas atau sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau sejarah yang dinamakan zaman Hindu. Sejarah kontemporer kadar subyektivitasnya

*) Dikutip dalam Waldemar Besson, *Geschichte*, Frankfurt a.M., 1961, 264.

*) David Thomson, *The Aims of History*, London, 1974², 89.

lebih besar karena pelakunya masih hidup. Dalam pada itu sejarawannya sesungguhnya juga pelaku, karena masih mengalami peristiwa yang dikisahkannya. Dengan demikian masalahnya ada dua. Satu pada pihak sejarawan dan lainnya pada pihak pelaku. (Tentu saja yang masih hidup. Pelaku yang sudah meninggal tentunya sudah tidak bisa berbuat apa-apa!). Pada pihak sejarawan kurangnya jarak waktu memainkan peranan besar di dalam memperbesar kadar subyektivitas, terutama yang menyangkut interpretasinya.

Pelbagai pihak pelaku biasanya tidak puas dengan penulisan sejarah yang menyangkut dirinya. Ia tidak puas, mungkin karena dirinya kurang digambarkan secara yang diinginkan, atau orang-orang yang disukainya kurang digambarkan secara yang diinginkan. Misalnya pengalaman Pak Diro yang pernah diceritakan kepada saya. Beliau menulis sebuah karangan mengenai peristiwa yang masuk sejarah kontemporer. Artinya, sejarah mengenai peristiwa yang beliau alami. Beliau lalu diserang oleh seorang pelaku karena dirinya tidak disebut dalam karangan itu. Ya, mungkin Pak Diro menganggap tokoh itu atau organisasinya tidak relevan di dalam episode yang dikisahkannya. Bagaimanapun juga beliau menyerang Pak Diro sangat tajam. Berkenaan dengan itu saya mengatakan bahwa dengan demikian Pak Diro sudah mengalami sendiri masalah penulisan sejarah kontemporer. Saya tidak jarang mengalami "dimaki-maki" oleh pelaku sejarah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya "memalsu sejarah".

Namun mengapa ada saja orang yang menuliskan sejarah kontemporer. Tentunya ada dorongan yang kuat kepada mereka untuk berbuat demikian.

Dorongan itu ialah karena adanya perubahan-perubahan yang besar dan cepat pada masa-masa mutakhir. Di negara-negara Barat perubahan-perubahan itu tidak terasa terlalu besar dan tidak terlalu cepat, karena masyarakatnya sudah stabil, institusi-institusinya sudah terkonsolidasi. Tetapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, perubahan-perubahan, terutama yang terjadi sejak tahun 1942 itu, luar biasa besarnya. Begitu cepat dan begitu besar perubahan itu sehingga kadang-kadang pelakunya kehilangan orientasi. Jadi perubahan yang

cepat dan besar itu cenderung untuk menimbulkan ketidak-mengertian dan kadang-kadang kebingungan pada pihak yang mengalaminya. Misalnya sekarang soal korupsi, soal penyalah-gunaan wewenang, soal pelbagai kepincangan dalam masyarakat. Ini mulai dulu juga sudah ada, bukan hal baru. Tetapi karena cepatnya perkembangan, seolah-olah ini hal yang baru sekarang ada. Sehingga kita jadi bingung, jadi resah, jadi macam-macam. Ini karena cepatnya perubahan dan karena di Indonesia sejarah kontemporer itu belum berkembang dengan luas. Andaikata sudah, tentunya orang tahu, "*er is niets nieuws onder de zon*". Artinya di bawah matahari tidak banyak yang baru. Mungkin bentuknya baru tetapi isinya sama saja.

METODE SEJARAH

Perlu di sini saya perkenalkan *metode sejarah*, karena merupakan alat yang dipergunakan oleh sejarawan untuk menyusun sejarah. Ada dua definisi yang saya ajukan yang dua-duanya sama kuatnya. Satunya menyatakan bahwa metode sejarah ialah sekumpulan prinsip dan aturan. Yang kedua menyatakan bahwa metode sejarah ialah suatu proses. Jadi agak berlainan: yang satu prinsip-prinsip, yang lain proses. Tetapi sesungguhnya, masing-masing bisa dianggap dua-duanya.

Definisi pertama ialah:

*"Historical method is a systematic body of principles and rules designed to aid effectively in gathering the source-materials of history, appraising them critically, and presenting a synthesis (generally in written form) of the results achieved." **

"Metode sejarah ialah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis

*) Gilbert J. Garraghan S.J., *A Guide to Historical Method*, 1948², 33

yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintese daripada hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis)."

Definisi yang lain ialah:

*"The process of critically examining and analysing the records and survivals of the past is here called historical method." **

Di sini prosesnya yang ditekankan, tetapi isinya sama. Jadi metode sejarah ialah sarana sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Uraian ini tentunya untuk bapak-bapak yang bukan sejarawan. Buat sejarawan semuanya itu *ouwe koek*; tetapi kiranya perlu untuk mempersamakan wawasan kita mengenai apa yang saya sajikan.

Proses metode sejarah ada 4 tahapnya. Pertama ialah *heuristik*. *Heuristik* ini dari bahasa Yunani *heuriskein* artinya: *to find*. *To find* berarti tidak hanya "menemukan", tetapi "mencari dahulu baru menemukan". Kalau dalam bahasa Indonesia, menemukan itu hanyalah: "Nah ini saya menemukan". Tetapi kalau *to find* artinya ialah: mencari dahulu baru menemukan; itulah arti *heuriskein*. *Heuristik* ialah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber.

Setelah sumber-sumber ditemukan, maka sumber-sumber itu diuji dengan kritik. *Kritik* ini ada 2 macam, kritik *ekstern* dan kritik *intern*. Kritik *ekstern* ini menyangkut dokumen-dokumennya. Kalau ada dokumen, misalnya, kita teliti apakah dokumen itu memang yang kita kehendaki atau tidak, apakah palsu atau sejati, apakah utuh ataukah sudah diubah sebagian-sebagian. Ini kritik *ekstern*. Kalau kita sudah puas mengenai suatu dokumen, artinya kita sudah yakin bahwa memang dokumen itulah yang kita kehendaki, baru kita menilai isinya, dan menilai isinya ini dilakukan dengan kritik *intern*.

Tujuan kritik seluruhnya ialah untuk menyeleksi *data* menjadi *fakta*. Di kalangan masyarakat luas, biasanya data dan fakta dicampur-

*) Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, 1969², 48

adukkan. Tetapi sesungguhnya ada bedanya. Data ialah semua bahan, fakta ialah bahan yang sudah lulus diuji dengan kritik. Itu baru fakta. Jadi fakta itu sudah terkoreksi. Setelah kita memperoleh sejumlah fakta yang cukup, maka kita harus melakukan usaha merangkaikan fakta-fakta itu menjadi sesuatu keseluruhan yang masuk akal.

Ini dilakukan dalam tahap ketiga metode sejarah, yaitu tahap *interpretasi*, tahap penafsiran. Setelah penafsirannya maka kita kemudian sampai pada tahap terakhir, yaitu *historiografi*, yaitu penulisan sejarah (berasal dari *graphein* dalam bahasa Yunani). Tujuan kegiatan di sini ialah untuk merangkaikan fakta-fakta menjadi kisah sejarah. Sebab bagaimanapun juga sejarah itu merupakan suatu kisah yang kita baca. Sehingga bahan-bahan mentah itu belum merupakan suatu sejarah, belum merupakan suatu kisah sejarah.

MASALAH SUBYEKTIVITAS SEJARAH

Obyektivitas dan *subyektivitas* merupakan suatu masalah yang sering dipersoalkan oleh masyarakat. Seringkali saya menerima nasihat dari pelbagai teman: "Saudara harus menulis sejarah yang obyektif, jangan subyektif." Ini tentu suatu nasihat yang beritikad baik, tetapi secara teknis saya tahu bahwa obyektivitas sejarah itu tidak mungkin dicapai. Ini perlu saya terangkan kepada khalayak ramai. Jadi jangan mengharapkan apa yang tidak mungkin. Sejarawan itu bukan dewa. Kalau istilahnya Pak Ali Sadikin, "bukan malaikat". Ia punya emosi. Dan selama penulis punya emosi tentu subyektif. Soalnya ialah seberapa jauh subyektivitas itu yang masih dianggap pantas, dan bagaimana yang dianggap sudah tidak pantas lagi. Di situlah letaknya. Di sini yang lebih baik kita lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana subyektivitas itu bisa timbul, dan mengapa timbul.

Subyektivitas itu timbul, pertama karena *sikap berat sebelah pribadi (personal bias)*. Ini contohnya. Di dalam sejarah itu selalu ada

apa yang kita sebutkan orang-orang besar, atau tokoh-tokoh besar atau pahlawan-pahlawan. Ada sejarawan yang menyukai pahlawan-pahlawan. Contoh yang gampang ialah Thomas Carlyle, sejarawan Inggris. Dia menganggap bahwa sejarah dunia itu pada dasarnya ialah sejarah orang-orang besar. "*Universal History, the history of what man has accomplished in this world, is at bottom the history of the Great Men who have worked here.*" Sehingga dia menulis suatu buku yang sudah klasik yang berjudul: *On heroes, hero-worship and the heroic in history.* (Mengenai pahlawan, pemujaan pahlawan dan kepahlawanan dalam sejarah). Buku itu isinya riwayat orang-orang besar melulu: Caesar, Yesus Kristus, Nabi Muhammad, dan sebagainya.

Sebaliknya ada orang Inggris lainnya yang membenci orang-orang besar, yaitu H.G. Wells. Ia berpendapat bahwa orang besar inilah yang "membikin rusak dunia". Seolah-olah dia berkata: "Untunglah bahwa dengan sekian banyaknya orang yang besar ini dunia masih berjalan dengan cukup baik." Sehingga bukunya *The Outline of History* boleh dikatakan tidak menonjolkan orang-orang besar. Kalaupun disinggung, mereka digambarkan sebagai *villain*, orang tidak baik. Inilah contoh dua sikap ekstrem, sikap berat-sebelah pribadi.

Pada umumnya sejarawan mengakui adanya orang besar, tetapi juga tidak mengatakan bahwa sejarah itu semata-mata sejarah orang besar. Jadi orang-orang kecil, tentunya secara massal (artinya bersama-sama), sebagai kolektivitas, juga mempunyai peranan di dalam sejarah. Inilah anggapan yang di tengah, yang saya kira paling banyak penganutnya. Sikap berat-sebelah pribadi ini akan mempengaruhi penulisan sejarah dari si sejarawan. Kalau sejarawan itu sudah *a priori* benci kepada orang besar, maka semua orang besar itu akan disoroti secara kurang positif, walaupun tidak sama sekali negatif. Kalau seseorang itu pemuja orang besar, maka tidak ada orang kecil yang bisa masuk sejarah. Hanya orang besar dan orang yang dianggap besar yang masuk sejarah. Ini salah satu sebab subyektivitas di bidang sejarah.

Yang kedua ialah *group prejudice* atau prasangka kelompok, yaitu sikap berat sebelah bukan karena pribadi tetapi karena kelompok-kelompok. Jadi misalnya kelompok bangsa, mempunyai rasa prasangka terhadap suatu kelompok bangsa lain. Misalnya saja, dua kali saya mengalami

pada suatu pertemuan internasional bertemu dengan utusan dari Mesir. Dua kali orang Mesir ini, secara bebas satu-sama-lain, mengucapkan hal yang sama kepada saya. Mereka kira-kira berkata: "Saya tahu bahwa bangsa Indonesia itu sahabat-sahabat besar bangsa Arab. Bangsa Indonesia secara konsekuen dan konsisten selalu membela perjuangan bangsa-bangsa Arab. *But tell me*, coba katakan kepada saya, mengapa orang-orang Indonesia kalau memaki temannya bilang: 'Arab lu!'"

Wah ini sulit sekali menjawabnya. Ini suatu *group prejudice*. *Group prejudice* dari pihak kita itu tentunya ada sebabnya, tetapi tentu saja tetap kurang baik. Kalau orang yang mempunyai antipati sedemikian menulis karya sejarah yang menyangkut kegiatan orang Arab, tentu dia akan terpengaruh. Tidak hanya terhadap orang Arab, terhadap golongan Cina juga ada prasangka-prasangka kelompok. Kalau di Eropa terhadap golongan Yahudi. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada persoalan antar-agama. Tetapi kalau di Eropa ada, misalnya di Irlandia. Sampai sekarang ini orang Protestan dan Katolik berbunuh-bunuhan karena agama. Di negara Libanon sampai pecah perang karena sengketa golongan Islam dan Kristen. Ini karena *group prejudice*. Kalau masing-masing pihak menulis sejarah mengenai negaranya, pasti akan terpengaruh, oleh *group prejudice* ini.

Yang ketiga yang menjadi sebab subyektivitas ialah *teori-teori interpretasi sejarah yang bertentangan*. Inilah sesungguhnya yang paling berpengaruh di dalam proses sejarah. Ada yang menyatakan faktor-faktor ekonomi. Misalnya Karl Marx: *De economische onderbouw*, itulah yang menentukan. Ada yang bilang: "Politik adalah panglima." Artinya yang menentukan segala-galanya itu politik. Ada yang menyatakan: bukan, faktor-faktor budayalah yang menentukan. Meskipun tidak kelihatan, tetapi faktor yang strategis itulah yang *in the long run* menentukan. Inilah teori-teori interpretasi sejarah. Jadi bergantung kita menganut teori yang mana. Maka sejarah yang kita tuliskan itu mungkin mempunyai corak yang lain dengan yang lain karena perbedaan teori interpretasi sejarah.

Yang keempat ialah *konflik-konflik filsafat*. Ambil misalnya contoh yang gampang saja. Pendapat orang yang menganggap bahwa Tuhan itu Mahakuasa, tentu lain dengan orang yang menganggap Tuhan itu tidak

ada. Kalau orang menganggap Tuhan ada, tentu sejarah ditafsirkan ada kaitannya dengan Tuhan. Kaitannya itu dapat langsung maupun tidak langsung, tetapi pasti ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya tentu tidak ada Tuhan di dalam sejarah. Ini juga akan menyebabkan prasangka atau sikap berat sebelah.

Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pengalaman saya, terutama sikap berat-sebelah pribadi dan prasangka kelompok itulah yang sangat berpengaruh. Jadi sikap berat sebelah karena kita menjadi anggota sesuatu kelompok, kita menganggap kelompok kita itu yang paling baik atau kita anggap kelompok lain itu jelek. Kelompok lain itu kita benci meskipun ada orang baik di antara anggota kelompok itu. Inilah prasangka kelompok.

MASALAH YANG DIHADAPI

Sekarang akan saya sampaikan apa saja masalah heuristik, masalah dalam usaha pencarian sumber bagi sejarah kontemporer Indonesia. Ini khusus di Indonesia.

Pertama, langkanya dokumen-dokumen yang tertulis, terutama bagi periode yang saya garap mulai zaman Jepang sampai zaman Perang Kemerdekaan. Yang sudah sedikit itu banyak pula yang dibakar, sehingga kebanyakan bahan yang terdapat hanyalah bahan-bahan lisan (hasil wawancara).

Kedua, pelaku-pelakunya sudah tua, ingatannya sudah mundur. Ini gejala yang umum. Jadi tidak dimaksudkan untuk melukai hati siapa pun. Ini konstataasi ilmiah belaka.

Ketiga, banyak bahan disimpan di rumah secara tidak sistematis. Memang, membawa pulang dokumen itu di Indonesia merupakan suatu "kebiasaan nasional". Kalau di Negeri Barat yang sudah berkembang, kalau ada janda seseorang tokoh yang tidak segera menyerahkan pe-

ninggalan suaminya, ia ditanyai: "Itu *papers* almarhum suami nyonya kok tidak diserahkan kepada Arsip Nasional?" Jadi dirasakan kurang bisa dipertanggungjawabkan bahwa *stukken* orang-orang besar disimpan di rumah yang ada kemungkinan kebakaran, kemungkinan banjir, kemungkinan pencurian. Maka akan diberikan saran kepada janda-janda itu untuk menitipkan *papers* suaminya di tempat yang aman. Artinya dokumentasi suaminya diserahkan kepada suatu badan penyimpanan arsip yang memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan dokumentasi.

Keempat, banyak bahan sejarah Indonesia ada di luar negeri. Ini tragis bagi sarjana Indonesia. Ia kalah estafet dengan sarjana-sarjana luar negeri, karena bahan-bahannya ada di negeri orang, tidak ada di sini. Terutama sekali tentu di negeri-negeri yang mempunyai kaitan dengan kita pada masa lampau, yaitu Belanda, Jepang dan juga Inggris. Tahun-tahun belakangan ini sudah ada suatu perjanjian antara kita dengan Belanda untuk pengembalian benda-benda sejarah dan budaya dari Negeri Belanda ke mari. Kebetulan saya duduk dalam delegasi Indonesia yang khusus dibentuk untuk urusan tersebut. Ada satu berkas yang tidak ada masalah untuk dikembalikan, yaitu arsip-arsip yang disebut *buütgemaakte archieven*. Ini arsip-arsip yang ditemukan oleh tentara Belanda waktu menyerbu Yogya lalu dibawa pulang. Jelas bahwa itu sesungguhnya dokumen kita. Tetapi waktu itu merupakan *oorlogsbut* (rampasan perang), ya haknya yang menang. Waktu itu untuk sementara waktu yang menang Belanda. Jadi dibawa pergi. Karena sekarang hubungan baik, maka dokumen-dokumen itu berangsur-angsur akan dikembalikan.

Di bidang kritik, jadi ini tahap kedua, masalahnya ialah: pertama kali pada para pelakunya ada *beda persepsi*. Sama-sama mengalami, tetapi persepsinya lain. Itu biasa, bukan suatu hal yang abnormal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghadiri ceramah pagi hari ini belum tentu persepsinya sama mengenai apa yang terjadi di sini.

Yang kedua *sengketa pribadi*. Artinya antara pelaku dengan pelaku itu ada pertentangan. Dan ini yang paling sulit buat sejarawan. Tentulah mereka tidak akan berkelahi di tengah wawancara, tetapi kadang-kadang berusaha mempengaruhi sejarawan supaya membenci tokoh yang dia benci. Ini buat sejarawan amat sulit. Kalau kita me-

nulisnya sedikit saja cenderung kepada yang A, yang B bilang: "Sejarah ini palsu." Cenderung ke B sedikit, "Oooh itu palsu." Kalau menulis di tengah, mungkin dua-duanya bilang: "Palsu!" Jadi tidak gampang menjadi sejarawan kontemporer, sering serba salah.

Yang ketiga, *pikun*. Artinya pelakunya sudah terlalu tua padahal pada umumnya kita terlalu lambat memulai usaha wawancara, sehingga ingatan para pelaku banyak yang sudah kabur. Tetapi tidak semua pelaku menyadari hal itu. Bahkan seringkali saya menerima penegean: "Saya ingat sekali, bahwa.....". "Saya yakin sekali, bahwa.....", dan sebagainya.

Yang keempat, *pretensi*. Pretensi ini kalau dalam bahasa biasa ialah: "Aku yang paling penting dalam peristiwa itu." Itu juga sulit. Soal pentingnya peranan sebenarnya relatif. Jadi jika sejarawan dalam interpretasinya kurang menonjolkan peranannya, lalu marah. Karena para pelaku banyak juga yang tokoh penting, lagi pula sudah tua, ya kami sebagai sejarawan diam saja jika di-"marahi".

Pada pihak masyarakat ada juga masalahnya. Pertama, *perebutan pahlawan*. Perebutan ini misalnya: "Oh pahlawan itu dari daerah saya, lahirnya di tempat saya; makamnya di sini, bukan di sana." Ini kedengarannya aneh, tetapi itu yang benar-benar saya alami. Kadang-kadang soal itu diseminarkan untuk mencapai konsensus atau dukungan. Padahal yang paling baik dilakukan ialah menugaskan kepada sejarawan profesional yang tidak ada kepentingannya, untuk melakukan penelitian. Jangan diserahkan kepada amatir. Kalau metodenya keliru, hasilnya malah tidak dapat diterima. Jadi segala biaya sia-sia.

Untuk mengatasi subyektivitas pelaku, dapat dilakukan dua hal. Pertama, kami telah melaksanakan kombinasi antara wawancara simultan dan wawancara individual. Pada wawancara simultan dinilai bahwa para pelaku itu ada *self-restraint* untuk tidak terlalu menonjolkan keakuannya, karena tokoh yang lain hadir. Kalau ada pelaku yang lain, biasanya ada rasa *sungkan*. Antara pelaku dengan pelaku itu ada diskusi. Dari diskusi ini sejarawan bisa menyimpulkan: "Oh kira-kira demikian yang benar."

Namun wawancara simultan ini ada keberatan-keberatannya juga. Misalnya mungkin ada seorang pelaku yang waktu itu menonjol hebat,

sekarang tidak pernah lagi disebut-sebut namanya. Ada pelaku yang dahulu kecil sekarang besar, yang dulu kecil menjadi menteri, yang dahulu pemimpinnya sekarang menjadi orang "biasa". Yang sekarang orang kecil dahulu orang besar. Jika ia mau bilang yang kurang hebat mengenai yang sekarang menjadi menteri, biasanya merasa *sungkan*. Rasa *sungkan*, peranannya jelas besar dalam wawancara sejarah. Jadi masih perlu wawancara simultan itu dilengkapi dengan wawancara individual jika terasa kebutuhannya. "Pak, tadi Bapak mau bicara mengenai Pak A itu apa sesungguhnya?" Mungkin keterangannya bisa "keluar". Itulah caranya.

Ini cara yang menurut pengalaman saya baru dikembangkan di Indonesia. Di negeri Barat sejauh saya tahu wawancara hanya secara individual. Saya tidak tahu, apa sebabnya. Tetapi kenyataannya ketika saya menyajikan penggunaan wawancara simultan di Indonesia kepada rekan-rekan di Amerika Serikat, mereka menerimanya sebagai suatu hal yang baru.

Yang kedua, untuk menguji saksi atau sumber, kita dapat mengajukan dua pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan yang pertama ialah: "Apakah ia *mampu* untuk memberikan keterangan yang benar?" Jadi kalau jawabnya "tidak", janganlah diwawancarai. Mampu tidaknya itu tergantung kepada dua hal. Pertama: hadir tidaknya sumber itu, dan kedua: pengetahuannya. Misalnya saya diundang oleh Pak Sjarif Thajeb untuk menghadiri suatu seminar Pediatri, yaitu ilmu kedokteran anak-anak. Sewaktu saya ditanya: "Bagaimana Pak, apa yang didiskusikan?" Mana saya mengerti, saya bukan seorang dokter, apalagi dokter anak-anak. Saya tidak mampu untuk memberi keterangan yang benar. Jadi pewawancara itu bertanya kepada alamat yang salah. Kemampuan itu mutlak di dalam menentukan nilai seorang saksi atau seorang sumber.

Pertanyaan kedua yang perlu ditanya ialah, apakah ia *mau* memberikan keterangan yang benar. Mau-tidaknya itu tergantung kepada pribadinya. Kalau kira-kira keterangannya itu merugikan dirinya, mungkin ia tidak mau menyatakan yang benar. Kalau dia orang yang baik, dia bilang: "*No, comment.*" Kalau dia tidak begitu baik, ya dia akan memberikan keterangan yang tidak benar. Ada seorang sejarawan yang menyatakan kepada saya, bahwa ia tidak setuju wawancara simultan.

Karena pada akhirnya yang dapat memberikan keterangan mengenai sesuatu peristiwa ialah orang-orang tertentu saja, yakni pelaku atau saksi. Jawab saya: "Wawancara simultan itu justru untuk membanding-bandingkan keterangan dari sesama pelaku atau saksi; karena belum tentu keterangannya sama, karena persepsinya berbeda."

DUA KOMPONEN SEJARAH : FAKTA DAN INTERPRETASI

Suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat ialah bahwa sejarah sebagai kisah itu mempunyai dua komponen. Komponen pertama ialah *fakta*. Komponen kedua ialah *interpretasi*. Ada suatu cerita untuk menjelaskan persoalannya. Saya mohon maaf, karena spesialisasi saya sejarah militer, maka contohnya pun sejarah militer. Tetapi ceritanya biasa. Ceritanya mengenai dua orang prajurit Inggris di padang pasir Afrika Utara selama Perang Dunia II. Setiap dua orang prajurit di dalam tentara Inggris di padang pasir itu rupa-rupanya mendapat satu tenda, barangkali semacam tenda yang dijual di Jalan Gatot Subroto, tenda pramuka yang kecil. Ceritanya, 2 orang prajurit itu pulang ke tendanya dari patroli di padang pasir, haus dan capai. Pada waktu masuk, mereka melihat di mejanya ada satu karaf berisi air hanya separo. Maka prajurit yang satu bilang: "Thank God! We still have half a pint of water!" Ia bersyukur: daripada kosong sama sekali mendingan separo.

Tetapi prajurit yang satunya setelah melihat karaf itu lalu berkata: "Goddamn! We only have half a pint of water!" Dia berpikir: daripada separo lebih baik penuh. Ini contoh yang baik untuk menggambarkan beda antara fakta dan interpretasi. Faktanya ialah satu karaf yang berisi air separo. (Kalau kita bilang karaf itu penuh berisi air, berarti kita memalsu fakta. Atau kita katakan karaf itu kosong sama sekali, itu pun memalsukan fakta). Tetapi bahwa kita mengatakan: "Thank God" atau "Goddamn", itu interpretasi. Kalau kita disuruh pilih, cocok yang mana: "Thank God" atau "Goddamn", ya bagi yang takwa kepada Tuhan, tentunya memilih "Thank God". Tapi kalau ada yang bilang "Goddamn", ya itu urusan dia. Itulah interpretasinya. Selama ia tidak memalsukan faktanya, tidak apa-apa dilihat dari sudut metode sejarah. Demikian pula, apakah ada yang bilang "still" atau "only" itu pun soal interpretasi.

Kesimpulannya ialah: mengenai fakta, kita menuntut supaya menepati apa yang benar-benar ada. Mengenai fakta itu kita bisa menuntut obyektivitas. Tetapi mengenai interpretasi, memang sukar dihindarkan, boleh saja subyektif. Faktanya sama, tetapi visi kita bisa lain-lain. Yang penting kita harus terus terang. Sekarang ini banyak orang yang bilang: "Saya ini obyektif", tetapi sesungguhnya dia mempunyai niat untuk memalsu sejarah. Orang lain yang dituduh memalsu, padahal dia sendiri yang memalsu sejarah. Ini seringkali terjadi. Jadi resep saya sebagai pelaksana penelitian sejarah, sebaiknya kita jujur mengakui: "Saya subyektif." Syukur-syukur kita mengakui: "Subyektif saya ini. Saya cenderung begini karena ini." Jadi pembaca itu sudah waspada terhadap subyektivitas kita. Tetapi kita berusaha terus untuk *fair* (dalam bahasa Inggrisnya). "*Fair*" itu adil, layak, pantas. Artinya, kalau kita mau tidak senang, ya tidak senang, tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang seimbang saja. (Dalam bahasa Jawa: "*Ngono ya ngono, nanging aja ngono.*") Tidak ada halangan untuk menyatakan pro dan kontra di dalam sejarah. Sejarah yang tidak ada pro dan kontra mungkin kering sekali, tidak menarik. Wanita itu cantik apa tidak? Ada yang senang gemuk, ada yang senang kurus, ada yang senang tinggi, ada yang senang pendek, ada yang senang putih, ada yang senang hitam. Selera-nya macam-macam. Tetapi sejarawan itu berhak juga menyatakan:

"Wah dia itu cantik sekali, hitam manis." Yang senang pada yang putih gurih, mungkin tidak setuju. Itu tidak jadi apa. Tetapi jangan sampai yang hitam dikatakan putih dan yang putih dikatakan hitam. Itu memalsu fakta. Itu yang tidak boleh. (Ini tentu saja uraian yang disimplifikasikan. Menurut filsafat sejarah, fakta itu sesungguhnya juga ditagalkan oleh interpretasi sejarah. Jadi relatif).

Mengenai subyektif-obyektif, mengenai soal memalsu sejarah, harus kita lihat pada latar belakang adanya dua komponen ini, komponen fakta dan komponen interpretasi. Mengenai komponen fakta kita bisa keras, harus kita tepati persyaratannya. Kalau mengenai interpretasi, kita boleh menyatakan pendapat kita asal kita jujur mengakui, jangan ditutup-tutupi. Pengalaman saya pribadi ialah melakukan wawancara sejarah mengenai zaman Jepang, sekitar Proklamasi, Pertempuran Surabaya dan mengenai Panglima Besar Soedirman.

Ini suatu contoh mengenai fakta yang sama tetapi interpretasi lain. Saya ambil saja antara interpretasi kita dengan interpretasi Belanda. Misalnya aksi-aksi militer yang dilakukan Belanda, yang pertama tahun 1947, yang kedua tahun 1948/1949, oleh Belanda disebut *politonele actie* (aksi polisionil). Bapak-bapak TNI waktu itu dianggap oleh Belanda bukan lawan yang sederajat sebagai militer, melainkan sebagai ekstremis, sebagai orang yang melakukan kegiatan tidak sah. Jadi harus ditindak secara polisionil. Ini interpretasinya yang lain, tetapi faktanya sama.

Mengenai "penyerahan kedaulatan" dan "pengakuan kedaulatan" soalnya lebih serius dan bukan hanya soal istilah, melainkan soal prinsipil. Sebab apa toh *war aim* kita, tujuan perang kita pada tahun 1945. Tujuan kita ialah memperoleh pengakuan bahwa kita dengan Negara Republik Indonesia sebagai aparatnya mempunyai kedaulatan di atas seluruh Indonesia, bekas Hindia Belanda, yang istilahnya ialah kedaulatan *de iure*. Itu kita *claim*. Belanda menyatakan: "Oh tidak, Belandalah yang punya kedaulatan *de iure* terhadap seluruh Indonesia." Jadi pada tahun 1945 begitu. Lalu kita mulai perundingan-perundingan de Hoge Veluwe, Linggajati, Renville dan KMB. Apa yang dirundingkan di sana? Tidak pernah disebut-sebut soal kedaulatan *de iure*. Itu sengaja tidak disebut-sebut karena pendirian masing-masing pihak tidak akan bertemu.

Yang dipersoalkan hanya kedaulatan *de facto*. Belanda bilang: "O.K.-lah. Kalian dalam kenyataannya menguasai Sumatra dan Jawa minus kota-kota besar yang kami duduki." Republik Indonesia mempertahankan kedaulatan *de facto* atas Jawa dan Sumatra. Sebaliknya kita berkata: "O.K.-lah Belanda. Saya mengakui situ punya kedaulatan *de facto* atas selebihnya Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian." Jadi inilah hasil perundingan: persoalan *de facto*. Dan kemudian kedua belah pihak bekerja sama untuk membentuk suatu negara Indonesia Serikat meliputi seluruh Indonesia. Sebagai hasil KMB, pada tanggal 29 Desember 1949 Belanda menandatangani suatu naskah resmi yang memang dalam naskah Persetujuan Den Haag hasil KMB tercantum "*transfer of sovereignty*" (penyerahan kedaulatan). Di negeri Belanda seolah-olah saya dianggap sebagai orang yang bohong. "Ini lihat, dokumennya ada. Ini kan tandatangan Pak Hatta, '*transfer of sovereignty*', penyerahan kedaulatan. Situ kok ngotot mengatakan 'pengakuan kedaulatan', bagaimana?" Saya jawab: "Itu kan interpretasi; faktanya tidak saya gugat, tetapi interpretasi saya tidak begitu. Interpretasi saya ialah bahwa kami mulai dahulu sudah *de iure* memegang kedaulatan atas seluruh Indonesia itu. Pada suatu ketika melalui sekian kali perundingan kita mengakui ada republik lain, yaitu Republik Indonesia Serikat *in plaats van* Republik Indonesia (Yogya). Tuan menganggap diri menyerahkan kedaulatan *de iure* kepada RIS. RIS itu memang pada dirinya sendiri tidak pernah punya kedaulatan *de iure*. Tetapi Republik Indonesia (Yogya) menganggap punya kedaulatan *de iure* itu. Dan RIS dianggap "*successor state*" dari RI. Jadi kalau kami mengakui bahwa Tuan pada tanggal 27 Desember 1949 menyerahkan kedaulatan itu, berarti sebelumnya tidak ada kedaulatan itu pada pihak kami. Implikasinya ialah, bahwa kami menyingkari Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal itu tidak mungkin kami lakukan, puluhan ribu orang telah mengorbankan nyawanya untuk itu."

Jadi ini soal interpretasi. Faktanya tidak saya persoalkan. Tetapi interpretasi saya itu bukan "penyerahan" melainkan "pengakuan", karena kedaulatan sudah ada di tangan kita. Saya lupa dalam buku-buku mana tercantumnya, tetapi ada beberapa pengarang Barat yang

menyatakan Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 1949. Ini berdasarkan interpretasi kolonialis.

Tadi sudah saya sebutkan, bahwa Belanda dulu menganggap sebagai ekstremis mereka, yang buat kita adalah pejuang kemerdekaan. Tergantung di mana berdirinya. Tetapi faktanya, bahwa ada orang yang begitu itu, tidak diingkari.

Lain daripada itu, menurut pengalaman saya, pelaku atau saksi bagi peristiwa yang sama, seringkali tidak mengakui fakta yang sama. Sekarang saya akan membahas soal ini.

SAMA-SAMA PELAKU ATAU SAKSI BELUM TENTU MENGAKUI FAHAM YANG SAMA

Ini contoh mengenai kasus yang faktanya saja sudah tidak klop, belum interpretasinya. Saya ambil contoh dari wawancara simultan. Pak Diro hadir, Pak dr. Abdullah hadir waktu wawancara simultan di rumah Pak Adam Malik. Yakni wawancara mengenai "Sekitar Proklamasi".

Pertama kali mengenai Peristiwa Rengasdengklok, perbedaan fakta antara Pak Hatta dengan Pak Affan. Affan seorang pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Darat. Waktu itu ia *syōdancō* PETA di Rengasdengklok. Kita tahu bahwa Sukarno-Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok.

Bung Karno membawa Ibu Fatmawati, dan Ibu Fatma membawa Guntur yang masih bayi. Karena diculik, tentunya berangkatnya tergesa-gesa, Ibu Fatma lupa membawa susu untuk Guntur. Sehingga anak itu rewel. Melihat Ibu Fatma yang sibuk waktu itu, Pak Hatta membantu menggendong Guntur. Tetapi beliau tidak punya pengalaman

menggendong bayi. Jadi mungkin kurang enak gendongannya. Pendeknya entah bagaimana, Guntur menangis, lalu ngompol di celana Pak Hatta. Menurut Affan, karena Pak Hatta kena ompol Guntur, kemudian dia mencari piyama ke dalam, dan ketemu piyama *Cūdancō* (komandan kompihnya, yaitu Subeno. Pak Beno badannya kira-kira sama dengan Pak Hatta. "Pak, ini piyama, supaya Bapak pakai ini. Ini (maksudnya celananya) akan kita kucek". (Kucek itu artinya di-cuci kecil).

Menurut Affan itulah yang terjadi. Jadi Pak Hatta masuk ke dalam ruangan, menukar celananya dengan piyama, lalu celananya dikucek sebentar. Tetapi Pak Hatta menyangkal berulang-ulang, "Oh tidak, saya tidak tukar pakaian." Pak Affan yang merasa diri orang kecil, ia seorang pensiunan Letnan Kolonel, berhadapan dengan pensiunan Wakil Presiden, ya mengalah. Ia mengatakan, "Kalau Bapak tidak merasa ingat ya tidak apa-apa. Tapi saya kan ditanya Pak Nugroho jadi saya menjawab. Menurut saya, saya menyampaikan piyama pada Bapak dan Bapak memakainya."

Contoh kedua mengenai perbedaan ingatan ialah antara Pak Hatta dengan Bu Fatmawati mengenai tempat duduk dalam mobil sewaktu kembali dari Rengasdengklok. Mereka berjalan dengan 2 mobil, mobil depan dan mobil belakang. Pak Hatta bercerita bahwa di mobil depan di kursi depan duduk sopir dan Sukarni. Di bangku belakang duduk Bung Karno di tengah, kanannya Pak Ahmad Subardjo, kirinya Pak Hatta. Pada waktu wawancara itu Ibu Fatmawati duduk di samping Pak Hatta pada satu sofa yang lebar; beliau langsung menepuk Pak Hatta dan berseru, "Ah Bung ini bagaimana. Saya kan duduk di samping Bung waktu itu di mobil." Jawab Pak Hatta: "Ah tidak, *jij was in die andere wagen* di belakang" (Anda di mobil lain yang di belakang). Sahut Ibu Fatmawati lagi, "Wah bagaimana Bung ini, masa tidak diakui saya duduk di sebelahnya." Bu Fatma agak tersinggung rupanya. (Artinya kalau seorang wanita itu sampai tidak *opgemerkt* oleh seorang pria, mungkin ada perasaan parasnya kurang impresif!). Ibu Fatma berani membantah, tetapi kalau Pak Affan "mengalah". Menurut Pak Bardjo, Bu Fatma memang duduk satu mobil dengan Pak Hatta. Jadi yang duduk di bangku belakang itu Bu Fatma dengan

Guntur, Bung Karno, Pak Hatta. Di depan bertiga: Pak Bardjo, Pak Karni dan sopir. Tetapi Pak Hatta sampai saat terakhir tidak mau mengakui hal itu: "Tidak, tidak betul itu. Jij zat achter." Bu Fatma tetap dikatakan duduk di mobil yang kedua.

Contoh ketiga ialah perbedaan antara Pak Hatta dengan Pak Bardjo, masih mengenai Rengasdengklok. Setelah Bung Karno dan Ibu Fatma turun di Pegangsaan Timur 56, mereka meneruskan perjalanan ke rumah Pak Hatta di jalan Diponegoro (sudah rumah yang sekarang). Sampai di sana Pak Hatta turun. Kesepakatan mereka ialah bahwa malam itu juga harus mengadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan, karena paginya kalau tidak ada Proklamasi, Pak Bardjo akan dibunuh oleh orang-orang PETA Rengasdengklok. Pak Bardjo berkepentingan sekali bahwa rapatnya terlaksana agar Proklamasi besok sudah terlaksana. Menurut Pak Hatta, Pak Bardjo turun lalu menelepon dari rumah beliau. Pak Bardjo membantah: "Lho tidak. Saya terus pulang lalu menelepon dari rumah saya sendiri." Pak Hatta membalas: "Oh tidak, Saudara turun di rumah saya waktu itu." Masing-masing tidak mau mundur dari pendiriannya.

Contoh keempat, ialah perbedaan ingatan antara Pak Hatta dengan Pak Sajuti Melik di rumah Duta Besar Inggris (Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta) untuk mengusut bagaimana jalannya pertemuan guna merumuskan naskah Proklamasi. Ceritanya begini. Mereka bertiga: Sukarno, Hatta, dan Subardjo mengundurkan diri ke ruang belakang untuk merumuskan naskah Proklamasi itu. Setelah selesai, beliau bertiga pergi ke depan lalu menghadapi tokoh-tokoh tua dan muda yang sedang berkumpul. Bung Karno sebagai yang senior mengatakan: "Mari saya bacakan naskah Proklamasi yang sudah kami susun bertiga." Lalu beliau membacakan. Kemudian kata beliau: "Mari saudara-saudara, kita tandatangi bersama-sama naskah Proklamasi ini." Bung Karno waktu itu mungkin menggambarkan naskah Proklamasi itu sebagai *Declaration of Independence* Amerika Serikat yang juga ditandatangani oleh sejumlah besar utusan dari negara-negara bagian.

Mendengar perkataan Bung Karno itu ada seorang pemuda nyeletuk: "Tidak, saya tidak setuju budak-budak Jepang ini ikut menandatangani naskah Proklamasi." Siapakah gerangan pemuda yang

nyeletuk begitu? Sebab sebagai akibat pendapat orang yang nyeletuk itu kemudian ada usul dari almarhum Sukarni. Hal ini diakui oleh semua yang hadir. Kata Pak Karni: "Yang menandatangani sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta saja berdua atas nama seluruh bangsa Indonesia. Sebab mereka berdua itu yang dikenal."

Menurut Pak Hatta yang nyeletuk ialah Sukarni. Setelah ada reaksi marah dari tokoh-tokoh "tua" yang dikatakan "budak-budak Jepang" itu, Pak Karni mengajukan usulnya supaya hanya Sukarno-Hatta saja yang menandatangani. Adapun Pak Sajuti Melik berpendapat, bahwa yang nyeletuk itu Chairul Saleh. Ini dibantah oleh Pak Hatta. Pak Hatta menyatakan: "Sukarni yang bilang begitu." Pak Sajuti Melik menahut: "Tidak, Bung Chairul Saleh." "Tidak, Sukarni". "Tidak, Bung Chairul". Lalu saya berkata: "Kiranya sudah cukup, Pak." Waktu itu hadir pula B.M. Diah. Saya tanya: "Pak Diah waktu itu kan hadir. Siapa yang waktu itu nyeletuk?" Pak Diah menjawab: "Saya malah sama sekali tidak mendengar." Nah ini malahan lain lagi.

Jadi semua yang hadir pada wawancara simultan itu semua pelaku, namun ingatannya berbeda-beda. Inilah yang menyulitkan sejarawan. Pada akhirnya ia harus memilih versi yang mana yang menurut pertimbangannya benar. Atau alternatif lain, ia menyebutkan semua versi yang ada. Tetapi cara ini membikin kaku cerita. Ini semua saya ajukan untuk memperlihatkan masalahnya agar orang sedikit punya pengertian terhadap kesulitan yang dialami sejarawan. Jangan terlalu cepat menuduh mereka memalsu sejarah.

Demikianlah uraian saya mengenai masalah yang dihadapi oleh sejarawan yang mengkhususkan diri pada sejarah kontemporer.

POST SCRIPTUM

Menjelang diterbitkannya brosur ini, saya memperoleh tambahan pengalaman sebagai sejarawan kontemporer yang dimaki-maki secara pribadi oleh seseorang, hanya karena ia berbeda pendapat dengan saya mengenai sesuatu fakta sejarah. Tidak hanya saya, melainkan banyak teman juga heran, karena perbedaan pendapat saja kok menjadi begitu sentimen, sehingga melancarkan suatu kampanye untuk menjelek-jelekkan saya dengan tidak segan-segan memutar-balikkan fakta dan mengadukan saya kepada pelbagai pejabat. Ketika saya menjelaskan cara penelitian yang saya lakukan di dalam suatu surat kabar yang telah pula memuat pendapatnya, karangan saya itu dikatakannya "*a-moral!*" Mungkin ia menderita frustrasi karena tidak dapat membuktikan kebenaran pendapatnya. Karena kebetulan saya seorang pejabat, maka sudah barang tentu saya tidak dapat melayani serangannya yang bersifat pribadi itu secara pribadi pula.

Seorang lain, yang tidak saya kenal dan bermukim di luar negeri,

dalam suratnya kepada saya (yang tembusannya dikirimkan kepada dua orang lain yang tidak disebutkan namanya), tidak menyetujui uraian saya di dalam suatu majalah mengenai fakta dan interpretasi. Tetapi saya tidak mengerti, mengapa ia begitu naik pitam karena uraian teoretis itu, sehingga memakai kata-kata makian terhadap saya yang semula saya tidak menyangka akan dilontarkan dalam rangka suatu perbedaan faham di bidang ilmiah. Ia memaki-maki dengan kata-kata (maafkan pembaca:) "Saudara ini benar-benar *SONTOLOYO* dan dekat-dekat *DOBOL!!!*" (Anehnya maki-makian itu dikutip oleh tokoh tersebut pertama, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah mereka termasuk satu golongan).

Bagi yang berminat dan agak sangsi membaca contoh-contoh ini, saya persilakan membaca sendiri, karena kesemuanya saya simpan sebagai *specimen* yang berharga. Tetapi mudah-mudahan jangan sampai para mahasiswa sejarah menjadi gentar untuk memilih spesialisasi sejarah kontemporer, karena di samping ada *makan hatinya*, lebih sering ada *besar hatinya* karena apresiasi masyarakat.

LAMPIRAN

ASAS-ASAS METODE SEJARAH

Pendahuluan

Sejak penulisan kisah sejarah dilakukan secara ilmiah, penulisan sejarah mempergunakan *metode sejarah*. Prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu, menurut kenyataannya terdiri atas:

1. Mencari jejak-jejak masa lampau.
2. Meneliti jejak-jejak secara kritis.
3. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak itu, berusaha membayangkan bagaimana bentuk masa lampau.
4. Menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif dari masa lampau itu sehingga sesuai dengan jejak-jejaknya maupun dengan imajinasi ilmiah.*)

*) Louis Gottschalk. The Historian and the Historical "Document" dalam *The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology*, Bulletin 53, Social Science Research Council, 1945.

Prosedur itulah yang disebut metode sejarah.

Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil di dalam keseluruhan prosedur, metode sejarah biasanya dibagi atas 4 kelompok kegiatan, yakni:

- I. *Heuristik*, yakni kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau.
- II. *Kritik* (sejarah), yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya.
- III. *Interpretasi*, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh secara itu.
- IV. *Penyajian*, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk sesuatu kisah.

Taraf terakhir itulah yang sesungguhnya merupakan *historiografi*.

Heuristik: mencari sumber-sumber

Jejak-jejak dari sejarah sebagai peristiwa, merupakan *sumber-sumber* bagi sejarah sebagai kisah dan disebut heuristik yang berasal dari kata Yunani *Heuriskein*, berarti menemukan.

Jika kita ingat bahwa sejarah terdiri atas begitu banyak periode dan dibagi-bagi atas begitu banyak bagian (politik, ekonomi, sosial, budaya, militer dan sebagainya), maka kita akan menyadari bahwa sumber-sumbernya beraneka ragam. Usaha kita untuk menemukan sumber-sumber bagi penelitian sejarah yang hendak kita lakukan, akan sangat sukar, jika kita tidak mengadakan klasifikasi atau penggolongan terhadap sekian banyaknya macam sumber itu.

Pelbagai ahli metodologi telah mencoba membuat klasifikasi semacam itu, dari yang sangat sederhana sampai kepada yang sangat bercabang-cabang. Klasifikasi yang sederhana misalnya saja membagi-bagi sumber-sumber sejarah atas tiga macam, yakni:

1. Sumber benda (bangunan, perkakas, senjata)
2. Sumber tertulis (dokumen).
3. Sumber lisan (misalnya hasil wawancara)

Sebaliknya ada klasifikasi yang sangat lanjut, misalnya seperti yang disusun oleh Garraghan.*) Ditinjau dari sudut praktis, rasanya cukup

*) Gilbert J. Garraghan S.J.A., *Guide To Historical Method*, 1948, 2nd. ed., 104-123.

jika kita mempergunakan beberapa klasifikasi yang sederhana.

Untuk lebih lanjut membagi-bagi sumber-sumber tertulis dapatlah kita membedakan antara sumber resmi dan tak resmi serta sumber formal dan informal. Kedua macam klasifikasi ini dapat saling potong-memotong: Ada dokumen resmi formal dan dokumen resmi informal. Ada pula dokumen tak resmi formal dan dokumen tak resmi informal. Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, adalah dokumen resmi formal. Surat dari Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Kepala Badan Perbekalan ABRI yang berupa "*kattebelletje*" mengenai pembuatan seragam ABRI ialah suatu dokumen resmi informal, karena ditulis oleh seseorang sebagai pejabat kepada pejabat yang lain, tetapi cara menulisnya "biasa". Surat Presiden Soeharto sebagai pribadi kepada kepala sesuatu sekolah mengenai hal-hwal putra beliau, adalah dokumen tak resmi formal karena ditulis sebagai bukan pejabat akan tetapi ditulis dengan surat yang memenuhi syarat-syarat surat menyurat formal. Dan akhirnya surat dalam perjalanan dari Pak Adam Malik kepada Ibu Adam Malik mengenai urusan rumah tangga yang ditinggalkan beliau merupakan dokumen tak resmi informal.

Masih satu macam klasifikasi yang perlu kita ketahui, yakni perbedaan antara sumber *primer* dan *sekunder*, karena sesungguhnya sesuatu karya sejarah sedapat-dapatnya harus didasarkan atas sumber-sumber primer. Memang karya sejarah yang memakai sumber-sumber primer dinilai lebih tinggi daripada karya sejarah yang berdasarkan sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber primer ialah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain. Buku Adam Malik dan Sidik Kertapati mengenai saat-saat sekitar Proklamasi merupakan sumber primer, karena kedua orang itu menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang diceritakannya. Sebaliknya pertelaan dari Benedict R.O.G. Anderson, *) adalah sumber sekunder.

*) *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation; 1944-1945, 1961.*

Setelah mengenali pelbagai macam sumber, kita harus mengetahui pula di mana kita dapat menemukan pelbagai sumber itu. Sumber-sumber benda pada umumnya disimpan di dalam museum-museum atau koleksi-koleksi pribadi. Kecuali museum-museum "umum" seperti museum *Gedung Gajah* di Jakarta, kita mempunyai beberapa museum khusus atau spesialis seperti Museum ABRI Satriamandala, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Pers dan lain sebagainya.

Dokumen-dokumen disimpan di dalam arsip-arsip. Arsip yang terpenting ialah *Arsip Nasional* di Jakarta. Tetapi sumber-sumber bagi sejarah masa yang terakhir umumnya masih terdapat di dalam arsip-arsip jawatan atau Departemen.

Kritik atau analisa: menilai sumber-sumber

Jika dalam usaha untuk menyusun fakta-fakta mengenai sesuatu bagian sejarah, kita menemukan sesuatu sumber, misalnya saja sebuah dokumen, bagaimanakah cara kita menyimpulkan informasi dari sumber itu? Apakah sumber itu memang bertalian dengan penelitian kita?

Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita kepada bidang kritik sejarah, yakni metode untuk menilai sumber-sumber yang kita butuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Maka dapat kita katakan, bahwa kritik sejarah terutama sekali mengenai sumber tertulis.

Setiap sumber mempunyai aspek *ekstern* dan aspek *intern*. Aspek eksternnya bersangkutan dengan persoalan apakah sumber itu memang merupakan sumber; artinya sumber sejati yang kita butuhkan. Aspek internnya bertalian apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan. Karena itu penilai sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi, ekstern dan intern.

Kritik ekstern bertugas menjawab tiga pertanyaan mengenai sesuatu sumber :

1. Adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?
2. Adakah sumber itu asli atau turunan?
3. Adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah?

Pertanyaan pertama mempersoalkan otentik tidaknya atau sejati tidaknya sesuatu sumber. Jika diungkapkan secara negatif pertanyaan akan berbunyi: Adakah sumber itu palsu?

Pertanyaan kedua mengenai asli tidaknya sesuatu sumber, harus dijawab dengan mempergunakan *analisa sumber*. Analisa sumber mencoba mengetahui apakah sesuatu sumber itu asli atautkah turunan. Sumber asli sudah barang tentu lebih tinggi mutunya daripada sumber turunan. Proses ini terutama sekali penting bagi dokumen-dokumen dari zaman dulu tatkala satu-satunya cara memperbanyak adalah dengan jalan menyalinnya. Dalam menyalin itu tentu ada kemungkinan timbulnya perubahan di dalam isi dokumen. Dokumen-dokumen dari zaman modern yang diperbanyak dengan *foto copy* atau dengan kertas karbon, sudah tentu lebih dapat dipercaya daripada sumber yang diturun dengan tangan. Pertanyaan ketiga dan terakhir adalah mengenai utuh tidaknya sumber-sumber, harus diatasi dengan *kritik-teks*. Kecuali untuk mengetahui perubahan-perubahan apa yang dibuat di dalam teks dalam usaha menyalinnya, kritik teks juga bertugas mengetahui bagaimana sesungguhnya isi sumber asli. "Asli" dalam arti kata yang sesungguhnya dari tangan pengarang dokumen. Dari sumber-sumber modern, sebuah reproduksi yang eksak (misalnya saja turunan karbon dari naskah ketikan) untuk keperluan sejarah dapat dianggap asli, dan karena itu keutuhan daripada sumber dapat dianggap terbukti.

Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan, bahwa kesaksian yang diberikan oleh sesuatu sumber itu memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara:

1. Penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber.
2. Membanding-bandingkan kesaksian dari pelbagai sumber.

Proses pertama, yakni penilaian *intrinsik*, dimulai dengan menentukan sifat dari sumber-sumber itu. Keterangan resmi Pusat Penerangan Hankam mengenai operasi keamanan di Irian Jaya, tentu saja berbeda isinya dengan laporan Panglima Kowilhan IV yang bertugas di sana kepada Menteri Hankam/Pangab. Sifat "*release*" dari sesuatu instansi penerangan memang berbeda dengan sesuatu laporan rahasia dari komandan bawahan kepada atasannya. Menilai keterangan Puspen Hankam tersebut di atas sama dengan sesuatu laporan rahasia dari Panglima

yang bersangkutan, merupakan kekeliruan dalam menjalankan kritik intern.

Langkah kedua menilai sesuatu sumber secara intrinsik, adalah dengan jalan menyoroti pengarang dari sumber itu. Sebab bagaimanapun juga, dialah yang memberikan informasi mengenai masa lampau yang ingin kita ketahui. Pastilah kita harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat kita percaya. Untuk mengetahui hal itu kita harus menanyakan dua pertanyaan:

a. Adakah ia mampu untuk memberikan kesaksian (kemampuan itu antara lain, berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa; kemampuan itu bergantung juga kepada keahliannya, karena keterangan seorang pesuruh mengenai jalannya sebuah rapat gubernur tentu patut kita sangsikan nilainya).

b. Adakah ia mau memberikan kesaksian yang benar (ini menyangkut kepentingan si pengarang terhadap peristiwa itu. Kita harus mengetahui apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebih-lebihkannya).

Proses kedua dari kritik intern, yakni membanding-bandingkan kesaksian pelbagai *sumber*, dilakukan dengan menjejerkan kesaksian, dari saksi-saksi yang tidak berhubungan satu sama lain. Prosedur semacam ini juga dilakukan dalam pengadilan-pengadilan.

Interpretasi atau sintesa: menafsirkan keterangan sumber-sumber

Setelah melakukan kritik intern, kita telah dapat menghimpun banyak sekali informasi mengenai sesuatu periode sejarah yang sedang kita pelajari. Berdasarkan segala keterangan itu dapat kita susun *fakta-fakta sejarah* yang dapat kita buktikan kebenarannya. Menurut Gottschalk, sebuah fakta sejarah atau "*historical fact*" adalah "*a particular derived directly or indirectly from historical documents and regarded as credible after careful testing in accordance with the canons of historical method*" (sesuatu unsur yang dijabarkan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap dapat dipercaya, setelah diuji dengan saksama sesuai dengan ketentuan-ketentuan metode sejarah).

Jelas bahwa *fakta* sejarah tidak sama dengan *data* sejarah atau

jejak-jejak sejarah-sebagai-peristiwa. Jejak-jejak itu hanyalah bahan-bahan mentah untuk menyusun fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah bukanlah fakta sejarah jika tidak dapat kita buktikan kebenarannya dengan bukti-bukti yang cukup. Tetapi dengan memperoleh fakta-fakta sejarah saja pekerjaan kita sebagai sejarawan belumlah selesai. Kumpulan fakta-fakta sejarah belum merupakan kisah sejarah. Penjejeran fakta-fakta sejarah belumlah merupakan historiografi. Daftar fakta sejarah yang disusun secara kronologis barulah merupakan *kronik* dan belum merupakan sejarah. Misalnya saja daftar fakta-fakta dari sejarah Perang Kemerdekaan kita setelah Proklamasi, Pembentukan BKR, Pembentukan TKR, Pertempuran Surabaya, Aksi Militer Belanda I, Aksi Militer Belanda II, Gencatan Senjata, Pengakuan Kedaulatan, barulah merupakan bahan-bahan mentah bagi penulisan sejarah Perang Kemerdekaan kita. Ciri dari historiografi dan hasilnya yang berupa sejarah (sebagai kisah) adalah *interpretasi*.

Pelbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus kita rangkai dan kita hubung-hubungkan hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa-peristiwa yang satu harus kita masukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkunginya.

Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya menjadi suatu kisah sejarah yang integral menyangkut proses *seleksi sejarah*. Sudah barang tentu tidak semua fakta dapat kita masukkan. Kita harus memilih mana yang relevan dan mana yang tidak. Pemilihan itu tergantung kepada anggapan-anggapan kita. Ini ada hubungannya dengan *subyektivitas sejarah*.

Ke dalam proses interpretasi ini termasuk pula *periodisasi* sejarah. Dalam kenyataannya peristiwa yang satu disusul oleh peristiwa yang lain tanpa batas-batas dan tanpa putus-putus. Tetapi di dalam historiografi kita mengadakan pembagian atas periode-periode berdasarkan anggapan kita, bahwa tiap-tiap periode itu diperinci oleh hal-hal yang khas. Menurut anggapan orang Indonesia, misalnya saja, tahun 1945 merupakan batas periode antara masa yang besar di dalam sejarah Indonesia yakni masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Menurut anggapan sejarawan kolonial Belanda, batas periode yang besar itu

adalah tahun 1949, yakni "penyerahan" kedaulatan. Ini menunjukkan perbedaan tafsiran mengenai fakta-fakta tertentu.

Historiografi: penulisan sejarah

Dengan ini kita telah sampai kepada klimaks dari penelitian sejarah yang kita lakukan dan sampai kepada bagian terakhir dari metode sejarah.

Kita telah mulai dengan menentukan apa yang hendak kita teliti, kita telah mencari sumber-sumbernya, kita telah menilai sumber-sumber itu dan menafsirkan informasi yang terkandung di dalamnya. Kini tiba saatnya hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta sejarah itu kita tuliskan menjadi suatu kisah yang selaras.

Di sinilah kita tiba pada persoalan kemahiran mengarang yang diperlukan oleh seorang sejarawan. Masalah bahasa sejarah tidaklah amat berbeda dengan masalah bahasa di dalam bidang-bidang lain yang mempergunakan bahasa. Yakni memakai bahasa baik dan menghindari bahasa buruk.

Bagaimanakah kita dapat memperbedakan bahasa "baik" dari bahasa "buruk" di dalam historiografi? Baiklah untuk menjawab pertanyaan itu kita minta pertolongan seorang filsuf, yang telah memusatkan satu bab dari salah satu bukunya kepada masalah membedakan bahasa baik dan bahasa buruk.

Menurut pendapatnya, bahasa harus dianggap sebagai alat untuk menyampaikan emosi dan pikiran kita. Alat yang tidak efisien adalah buruk; alat yang efisien adalah baik. Karena itu bahasa buruk adalah bahasa yang tidak dapat mencapai tujuan yang menjadi sebab dipergunakannya; sebaliknya bahasa baik adalah bahasa yang dapat mencapai tujuan itu. Persoalan apakah kita mempergunakan bahasa dengan baik atau dengan buruk, tergantung kepada tujuan kita mempergunakannya. Jika kita mempergunakan bahasa untuk membangkitkan emosi pembaca kita, maka bahasa yang retorik atau emotif adalah baik; tetapi bahasa itu akan merupakan bahasa buruk jika kita pakai untuk sebuah kuliah mengenai kehidupan nyamuk malaria.*)

*) L. Susan Stebbing, *Thinking to some Purpose*, Penguin, 5th. ed., 1961, 57, 58.

Karena sejarah adalah juga suatu seni (meskipun memiliki sifat-sifat ilmiah pula), agaknya kita dapat menerima anggapan bahwa bahasa sejarah seharusnya sama dengan bahasa prosa literer modern kita. Sedang sejarawan yang baik seharusnya mempunyai sifat-sifat seorang pengarang prosa sastra yang baik. Sifat ilmiah dari sejarah jangan sampai dianggap sejajar dengan sifat menjemukan. Karena, seperti kata Profesor Pollard: "*Facts and figures are dry bones; it requires imagination to clothe them with life and meaning; and no accumulation of materials, no ransacking of archives, will make a man a historian without the capacity to interpret and construct*". *) (Fakta dan angka adalah tulang-tulang yang kering; untuk membusanainya dengan hidup dan makna diperlukan imajinasi; kegiatan menghimpun bahan-bahan maupun membongkar arsip-arsip, tidak akan membuat seseorang menjadi sejarawan, jika ia tidak mempunyai kemampuan untuk memberi interpretasi dan menyusun (suatu kisah-sejarah).

*) A.F. Pollard, *Factors in Modern History*, 1960, 14.

RIWAYAT HIDUP

Keterangan pribadi

N a m a : Nugroho Notosusanto
Tempat / Tanggal lahir : Rembang, 15 Juni 1931 (Jawa Tengah)
A l a m a t : Jalan Daksinapati Timur A/I No. 18,
Kampus Universitas Indonesia Rawamangun, Jakarta Timur.

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Sastra dan Doktor dalam Ilmu-ilmu Sastra (Sejarah) dari Universitas Indonesia.
2. Memperdalam pengetahuan di bidang Metode Sejarah dan Filsafat Sejarah pada University of London (1961-1962).

II. Tugas kerja

- 1945 : Anggota Badan Keamanan Rakyat, Jakarta.
1947 : Anggota Batalyon A, Mobiele Brigade MBT, TNI.
1948 : Anggota Detasemen Staf Brigade 17 TNI.
1951 : Melanjutkan studi pada Universitas Indonesia.
1960 – sekarang : Dosen–Lektor Kepala pada Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
1963 – 1964 : Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
1964 – 1967 : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Indonesia.
1964 – sekarang : 1. Kepala Pusat Sejarah ABRI, Departemen Hankam.
2. Pengajar pada SESKO ABRI (berturut-turut pada bagian Darat, Laut, Udara, Kepolisian dan Gabungan).
1967 – sekarang : Pengajar pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
1971 – sekarang : Wakil Ketua Harian Badan Pembina Pahlawan Pusat.
1974 – sekarang : Anggota Dewan Pers.
1975 – sekarang : Anggota Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan.
1975 – sekarang : Pengajar pada Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu), Departemen Luar Negeri.
1983 – sekarang : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

III. Kegiatan-kegiatan lain

- 1957 : Ketua Delegasi Indonesia ke Asian Student Press Conference di Manila, Filipina.
- 1970 : Ketua Team Penulisan Biografi Pahlawan Nasional, (Badan Pembina Pahlawan Pusat).
- 1971 : 1. Ketua Proyek Penulisan Text-book Sejarah Hankam/ABRI.
2. Ketua Team Pelaksana Pengisian Museum Sejarah Tugu Nasional.
3. Wakil Ketua II dan Ketua Panel VI Panitia Penulisan Buku Standard Sejarah Nasional Indonesia.
- 1973 : Ketua Team Peneliti Route Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman.
- 1974 : Anggota Team Pembangunan Monumen Pahlawan Nasional, TMP Kalibata; perwira peneliti pahlawan tak dikenal.
- 1975 : Ketua Team dan Editor Panitia Penyusunan Text-book Sejarah Nasional Indonesia untuk SLP.
- 1976 : Ketua Team dan Editor Panitia Penyusunan Text-book Sejarah Nasional Indonesia untuk SLA.
- 1976 / 1977 : Anggota Delegasi Indonesia untuk pengembalian benda-benda sejarah dan budaya dari negeri Belanda.

IV. Karya tulis

A. ILMIAH

Buku/Brosur:

1. *Pemberontakan Tentara PETA Blitar melawan Jepang: 14 Pebruari 1944*, 1968.

2. *The Coup-attempt of the September 30 movement in Indonesia* (Karya bersama Ismail Saleh), 1968.
3. *Bidang Sosial Budaya dalam rangka Ketahanan Nasional*, 1968.
4. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966*, 1970.
5. *The Battle of Surabaya*, 1970.
6. *The PETA Army in Indonesia 1943-1945*, 1971.
7. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, 1971.
8. *Ikhtisar Sejarah Republik Indonesia (1945-sekarang)*, 1971.
9. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, 1971.
10. *Markas Besar Komando Jawa*, 1973.
11. *The Revolt Against The Japanese of a PETA- Battalion in Blitar (Februari 14, 1945)*, 1974.
12. *The Transfer of Values in The Indonesian Armed Forces*, 1974.
13. *Generations in Indonesia*, 1974.
14. *Some Effects of the Guerilla on Armed Forces and Society in Indonesia 1948-1949*, 1974.
15. *Armed Forces and Society in Indonesia: Past, Present and Future*, 1974.
16. *Sejarah Nasional Indonesia* (Editor) Jilid VI, 1975.
17. *The Japanese Occupation and Indonesian Independence*, 1975.
18. *The National Struggle and The Armed Forces in Indonesia*, 1975.

B. ILMIAH-POPULER

Buku/Brosur:

1. *Hakekat Sejarah dan Azas-azas Metode Sejarah*, 1965.
2. *Sejarah dan Sejarahawan*, 1965.
3. *Sejarah dan Hankam*, 1968.

C. FIKSI

1. *Hujan Kepagian*, 1958.
2. *Tiga Kota*, 1959.
3. *Rasa Sayange*, 1961.
4. *Hijau Tanahku, Hijau Bajuku*, 1961.

Bunga rampai luar negeri yang memuat ceritanya:

1. Denys Lombard, *Histoires Courtes d'Indonésie: Soixante huit "Tjerpen" (1933-1965)*, 1968. (Cerita: "Mbah Danu", "La jeune mariée" dan "Tajuban").
2. Irene Hilgers-Hesse *et.al.*, *Perlen im Reisfeld: Indonesien in Erzählungen der besten zeitgenössischen Autoren*, 1971. (Cerita: "Die Schlange").
3. Harry Aveling, *From Surabaya to Armageddon: Indonesian Short Stories*, 1976. (Cerita: "The Soldier" dan "The Transfer").

D. TERJEMAHAN

1. *Perang Salib di Eropah*, 1968 (dari Dwight D. Eisenhower, *Crusade in Europe*).
 2. *Kisah Daripada Bahasa*, 1971 (dari Mario Pei, *The Story of Language*).
 3. *Mengerti Sejarah*, 1975 (dari Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*).
-

YAYASAN IDAYU

Tujuan

- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam:
 - a. meningkatkan kecerdasan umum bangsa Indonesia
 - b. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.
- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, dalam bidang pembangunan pada umumnya dan dalam lapangan penyelidikan ilmiah, pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan, pada khususnya.

Penyalur Tunggal :



PT GUNUNG AGUNG

Kwitang 8, Jakarta